BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 155 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
    1) pajak daerah
    2) retribusi daerah
    3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
    4) lain-lain PAD yang sah
b. pendapatan transfer
    1) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a) dana perimbangan

(1) DBH yang terdiri dari:

(a) pajak

i. pajak bumi dan bangunan (PBB)

ii. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

(b) cukai

i. cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(c) sumber daya alam

i. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

ii. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

iii. penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

iv. penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan

v. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

(2) DAU

(3) DAK

b) dana otonomi khusus

c) dana keistimewaan

d) dana Desa

2) transfer antar-Daerah terdiri atas

a) pendapatan bagi hasil

b) bantuan keuangan

c. lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah (basis kas) adalah Pendapatan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

semua Pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. (Halim, 2007 dalam Asrah, 2012).

Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi, pengertian dari pendapatan asli daerah adalah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Mardiasmo, 2002 dalam Jolianis 2012).

Menurut Jolianis (2012) pendapatan asli daerah merupakan bagian terpenting dari penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD yang diterima maka akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga akan mencerminkan perkembangan perekonomian daerah (Sidik, 2002 dalam Jolianis 2012).

Tambunan (2006 dalam Jolianis 2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli

daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya.

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai data di BPS pada pembukuan tahun 2014 tabel Bagian Pendapatan Asli Daerah/*Regional Own Revenue* Kota Yogyakarta meliputi:

a. Pajak Daerah/*Regional Taxes*
b. Retribusi Daerah/*Receipt for Service*
c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan/*Regional Manufacture Interest*
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah/*Other Receipts*

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih diketahui sebagai berikut.

1.1 Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2 Retribusi Daerah

Pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Keterkaitan Antar Variabel

a. Keterkaitan PDRB dengan PAD

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi. (BPS DI Yogyakarta Dalam Angka, 2014: 541)

PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan

mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003 dalam Yuliana 2013).

Menurut Halim, 2001 dalam Yeny dan Taufik, 2014 menyatakan bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau upaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio antara total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima dari PDRB yang meningkat setiap tahunnya, akan berpengaruh terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima akan meningkatkan APBD disisi pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, ataupun pembiayaan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri” pada tahun 2005 menyatakan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

b. Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD

Pengeluaran pemerintah untuk jaminan social, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Suparmoko, 1996)

Sukirno dalam Suparmoko, 2000, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat dipandang sehingga pembelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya, ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah.

1) Pajak yang diharapkan akan diterima.
2) Pertimbangan-pertimbangan politik.
3) Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan pernyataan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi.

Menurut Halim, 2001 dalam Jolianis, 2012 bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan PAD.

Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD. (Mardiasmo, 2004 dalam Yuliana, 2013)

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksanya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-

perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994: 151). Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran Pendapatan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Didukung dengan teori dari Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksakan pembangunan. Anggaran yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan maupun kegiatan pembangunan. Semakin besar pegeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan maka akan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila kegiatan ekonomi masyarakat meningkat maka akan meningkatkan pula aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Efisiensi adalah kondisi saat pengeluaran = penerimaan. Artinya ketika pengeluaran pemerintah digunakan untuk melaksakan program yang bisa memberikan keuntungan atau manfaat bagi Negara terutama rakyat, sehingga penerimaan Negara bisa meningkat dan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dengan penerimaan pemerintah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengeluaran Pemerintah berhubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, apabila pendapatan daerah semakin besar maka akan diikuti dengan meningkatnya pula pengeluaran pemerintah.

c. Keterkaitan PMDN dengan PAD

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah. Meningkatnya penerimaan daerah akan memicu pemerintah untuk mendukung dan mendorong masyarakatnya untuk berinvestasi sehingga masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada menabung biasa. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan modal dan keuntungan bagi perusahaan. Semakin banyak masyarakat atau perusahaan dalam suatu daerah yang berinvestasi maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah juga ikut meningkat. (Yuliana, 2013)

Selanjutnya menurut Mubyarto bahwa pendapatan nasional dalam skala regional kita sebut dengan Pendapatan Daerah akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun. Sehingga dengan demikian, Kabupaten/Kota yang merupakan tujuan investasi para pelaku bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang daya tarik investasinya rendah.

Todaro, 2013, menjelaskan bahwa pembentukan modal swasta atau lebih sering dikenal dengan sebagai investasi pada hakekatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yng dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Akumulasi yang ada ditabung akan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan dikemudian hari.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas. Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal baik dari investasi swasta dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun (Mardiasmo, 2002 dalam Jolianis 2012).

Semakin banyak pihak swasta yang menginvestasikan modalnya pada suatu daerah tentunya akan dapat memberikan keuntungan bagi daerahnya, karena dengan peningkatan investasi akan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Kuncoro, 2004 dalam Jolianis 2012)

Tiga fungsi penting dari kegiatan investasi menurut Sukirno, 2005.

1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3) Investasi selalu diikuti perkembangan tekhnologi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Kesimpulan
Yeny Kurniawati dan Taufik Kurrohman, 2014	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Investasi Swasta (X3)	Regresi Liner Berganda	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Ifan Restu Bagus Pamungkas, 2013	Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), PMDN (X1), PMA (X2), PDRB (X3)	Regresi Linier Berganda	PMDN berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) PMA tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lanjutan Tabel

Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Kesimpulan
Jolianis, 2012	Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat	Perekonomian Daerah (Y1), PAD (Y2), Konsumsi Rumah Tangga (X1), Investasi Swasta (X2), Belanja Pembangunan (X3), Tenaga Kerja (X4)	Panel	Konsumsi RT, investasi swasta, dan belanja pembangunan secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian daerah PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah
Yuliana Florentina Ema, 2012	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1995-2010	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Investasi (X3)	Analisis Regresi Berganda	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapan Asli Daerah (PAD)
Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu, 2005	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), Pengeluaran Pemerintah (X1), Jumlah Penduduk (X2), Produk Domestik Regional Bruto (X3)	Analisis Regresi Berganda	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

C. Hipotesis

H_1: Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H_2: Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H_3: Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Kerangka Pikir

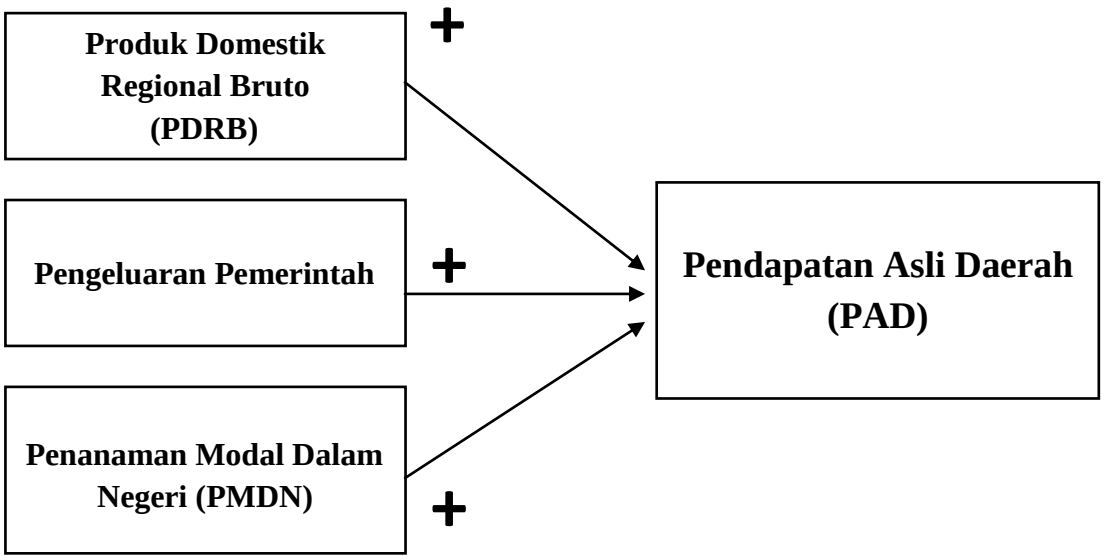

Gambar 2.1
Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Variabel yang Mempengaruhinya